

# DEMOKRASI DALAM KEBERAGAMAN



**Gandhi Pharmacist, S.H., M.H.**  
**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan)**

## **Pendahuluan**

Sebagai salah satu negara demokrasi besar dunia, Indonesia selalu menjadi perhatian negara-negara lain sebagai acuan atau model pelaksanaan sistem demokrasi yang baik dan berkualitas. Pesta demokrasi lima tahunan ini tergolong kegiatan sacral dan maha penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seyogyanya tidak boleh ada hal yang dapat mencederai segala nilai-nilai kesakralan tersebut.

Dengan memegang teguh prinsip atau asas Pemilu "Luber dan Jurdil" dapat membuat Pilpres semakin berkualitas. Rahasia dalam asas pemilu dimaknai bahwa suara hak pilih setiap rakyat dijamin kerahasiaannya oleh pemerintah atau dengan kata lain hasil pilihan yang masuk ke kotak suara tidak akan diketahui siapa pemiliknya dan memilih siapa, kecuali orang yang bersangkutan mengutarakannya kepada orang lain.

Demokrasi dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang universal dan telah banyak didiskusikan oleh berbagai

kalangan, mulai dari praktisi politik sampai para akademisi. Diantaranya adalah Amartya Sen, dalam karyanya yang berjudul "Democracy as universal Value". Ia mengupas tentang konsep nilai-nilai demokrasi yang menurutnya secara ideal bisa diterapkan oleh bangsa manapun. Konsep ini juga bisa dijumpai di mana pun bangsa yang telah mempunyai tradisi demokrasi.

Hal yang paling penting dan harus diutamakan haruslah menjadikan pemilu yang sejuk dan memiliki penuh keberagaman, yang berpedoman terhadap Pancasila sebagai ideologi

negara dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

## Pembahasan

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi tidak hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku.

Kualitas demokrasi juga terkait dengan sistem politik yang menggunakannya. Tidak mungkin kualitas demokrasi di bawah rezim yang otoriter bernilai positif. Sebaliknya demokrasi yang baik hanya mungkin dihasilkan oleh kekuasaan yang tidak memanipulasi makna demokrasi. Demokrasi sarat dengan nilai-nilai yang meliputi:

1. Kejujuran, menjadi syarat mendasar dari sebuah kehidupan demokrasi. Sebuah pemerintahan harus secara jujur dalam menjalani kebijakan-kebijakan serta pertanggungjawabannya. Nilai-nilai ini seharusnya mulai tercermin dalam sistem pemilihan yang merupakan fase awal dari pelaksanaan demokrasi. Aspirasi rakyat hendaknya disampaikan sesuai hati nurani tanpa dipergaruhi variabel-variabel lainnya.
2. Kebebasan, demokrasi menjamin kebebasan warganya menyuarakan pendapatnya. Setiap warga bebas berkumpul dan berorganisasi sebagai wujud ekspresi kebebasan. Masyarakat bebas berpartisipasi sesuai kehendaknya. Pembatasan terhadap kebebasan warga merupakan praktik antidemokrasi.
3. Kepatuhan, demokrasi memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Rambu-rambu tersebut atau yang lebih dikenal dengan *Rule Of Law*, menjadi penjaga agar kebebasan berlangsung tertib. Kepatuhan terhadap rule of law akan meminimalisasi terjadinya *chaos* dalam kehidupan demokrasi.
4. Persamaan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan. Di depan hukum memiliki kedudukan yang terhadap *rule of law*. Di bidang politik memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih ataupun dipilih di bidang ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Di bidang pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan
5. Toleransi, perbedaan pendapat merupakan suatu kewajaran dalam praktik demokrasi. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting bagi tumbuh berkembangnya demokrasi. Pemaksaan pendapat terhadap orang lain merupakan wujud ketiadaan penghargaan terhadap hak asasi orang lain.

6. Perdamaian, demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai ke tingkat minimum dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan damai dan secara melembaga. Perubahan dilakukan secara damai dan menghindari terjadinya anarkisme.
7. Tata Krama, demokrasi juga mengindahkan tata karma dalam prosesnya. Demokrasi akan tumbuh sehat jika para pihak menjunjung tinggi etika demokrasi. Penyampaian pendapat yang obyektif dan santun, serta tidak cenderung menyebarkan fitnah adalah cermin dari kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dalam analisis modern, partisipasi politik merupakan hal penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Di negara-negara demokrasi jika partisipasi masyarakat lebih banyak maka partisipasi ini dianggap lebih baik. Dalam perspektif ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam

kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik selain rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Terdapat dua faktor yang memengaruhi partisipasi politik seseorang yaitu:

1. kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara ; dan
2. kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor yang memengaruhi tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik yaitu:

1. partisipasi politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi;
2. partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah;
3. partisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi;
4. partisipasi politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

## Penutup

Munculnya transisi demokrasi di Indonesia dimulai dari penerapan multipartai yang dimaksudkan sebagai penguatan lembaga perwakilan rakyat. Namun, kualitas demokrasi yang dipertontonkan melalui panggung parlemen ini dianggap belum cukup kuat menumbuhkan kehidupan demokrasi yang lebih substansial, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Mengingat besarnya manfaat Pemilu langsung bagi pengembangan demokrasi, partisipasi publik dan percepatan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, maka sungguh disayangkan bila ajang ini harus cacat dan rusak dengan praktik *money politic*, *unfair game*, tidak siap kalah dan lain-lain. Sangat dibutuhkan peran dan kejujuran dari semua pihak agar dapat mewujudkan pemilu demokratis dan harmonis di Indonesia yang legitimate untuk memimpin nasional dan mewujudkan keberhasilan bangsa.

Oleh karena literasi media diperlukan untuk memberikan kecakapan dalam mengonsumsi dan memproduksi berita, terutama berita politik di media sosial. Pendekatan budaya, terutama budaya lokal yang sarat kearifan lokal (*local wisdom*) yang berisi

nilai-nilai yang tumbuh, berkembang, berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat lokal diharapkan dapat kembali merekatkan berbagai elemen masyarakat. Budaya lokal berkontribusi memperkuat budaya nasional, karena budaya nasional dibentuk dari puncak budaya lokal yang adiluhung. Dengan pendekatan budaya maka komunikasi antarsuku, etnis, ras, dan agama dapat dijalin dalam semangat membangun saling pengertian, toleransi, persatuan dalam harmoni keberagaman.

## Daftar Pustaka

- Sen, Amartya, Democracy as Universal Value, *Journal of Democracy* Vol. 103, 1999.
- Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI : Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945, Sebagai Konstitusi negara Serta Ketetapan MPR NKRI sebagai Bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan negara, 2015.
- Budiardjo, Miriam. 2008. "Dasar-Dasar Ilmu Politik" Jakarta; Gramedia Pustaka.
- Surbakti Ramlan. 2010. "Memahami Ilmu Politik" Jakarta: Gramedia Pustaka

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu (QS. al-Nisa: 135)*